

BAB V

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah penulis kemukakan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Institusi (Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai Politik dan Parlemen) yang seharusnya mencegah korupsi tidak berjalan bahkan larut dan terbuai dalam korupsi. Oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Untuk itulah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berperan menangani kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.
2. Kendala yang dihadapi KPK adalah lemahnya perlindungan terhadap saksi karena belum dibahasnya Undang-Undang Perlindungan Saksi, mminimnya jumlah sumber daya Manusia (SDM), serta dalam menindaklanjuti laporan yang masuk. Karena kekurangan bukti yang disertakan di dalam laporan tersebut.
3. Upaya yang dilakukan KPK mencakup Pengembangan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan, perbaikan peralatan dan teknologi, kampanye dan sosialisasi serta pengembangan jaringan kerja sama.

SARAN-SARAN

1. KPK sudah harus mampu memiliki karakter yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Tidak hanya bertindak mengikuti opini publik. Apalagi bertindak atas kepentingan politik. KPK dapat bertindak luar biasa dengan karakter yang luar biasa. Agar KPK mampu berperan secara optimal dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. KPK dibentuk untuk memberi pengaruh positif terhadap institusi yang telah ada. Karenanya, KPK diharapkan mampu menularkan virus antikorupsi kepada institusi yang telah terpuruk dalam sistem yang korup.
2. Dalam mengatasi kendala-kendala yang ada, KPK harus menentukan prioritas. Misalnya, menentukan prioritas untuk reformasi birokrasi. Karena, tanpa adanya pembenahan dalam sistem birokrasi yang cenderung korup, maka pemberantasan korupsi akan terhambat. Dengan penambahan SDM yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi terhadap tanggungjawabnya akan membantu mempercepat proses laporan yang masuk. Sehingga kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dapat diproses hukum.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) harus terus dioptimalkan. Dengan cara meningkatkan pengetahuan pegawainya. Baik melalui pelatihan ataupun pendidikan ke luar negeri.